



BULAN

JAN	FEB	MART	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	20..14
-----	-----	------	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	--------

TANGGAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

HAL : 11

BPK Soroti Subsidi Pupuk

JAKARTA - Kebijakan pemberian subsidi untuk petani memerlukan pengawasan ketat. Subsidi pupuk dan benih senilai Rp 13,7 triliun yang disalurkan dengan mekanisme terbuka dianggap kurang memadai dan tidak tepat sasaran.

"Subsidi yang diberikan seharusnya Rp 60 triliun yang secara langsung diberikan kepada petani, bukan melalui subsidi pupuk dan benih yang kenyataannya tidak beredar di lapangan," ucap anggota BPK Ali Masykur Musa kemarin (3/2).

Dia mengusulkan penyempurnaan kebijakan subsidi tersebut. Selain memperbaiki mekanisme penyaluran, perlu ada subsidi di sektor hilir, yakni pembelian hasil panen petani oleh pemerintah dengan harga yang pantas. Idealnya, petani memperoleh keuntungan 25 persen dari modal yang dikeluarkan. "Dengan cara ini, petani

masih memperoleh kelebihan dana yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan," katanya.

Ali membandingkan besaran subsidi untuk sektor pertanian yang hanya 6 persen dengan subsidi BBM Rp 227 triliun per tahun yang lebih dinikmati kalangan menengah ke atas. Selain mengurangi besaran subsidi untuk energi, subsidi untuk petani dapat berasal dari pos bantuan sosial seperti dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang tidak mampu memberdayakan kemampuan masyarakat.

Sebaliknya, pemerintah diimbau meningkatkan program padat karya seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), khususnya perbaikan infrastruktur dan lingkungan. (JPNN/c10/agn)